

DAFTAR PUSTAKA

- [Bappeda Kab. Sijunjung] Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sijunjung. 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Sijunjung
- [BPKP] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. Petunjuk Penggunaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. 2017. Kabupaten Sijunjung dalam Angka Tahun 2017. Sijunjung
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung. 2017. Kecamatan Koto VII dalam Angka Tahun 2017. Sijunjung
- Bintaro R. 1989. Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan HM, 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial, Jakarta: Kencana Prenama Media Group
- Hartono, Eko Budi, 2008. Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa [Tesis]. Purwokerto. Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 2. Makassar. Universitas Hasanuddin Hal 15-30
- Hasibuan Sara N., Sebayang Asnita F., Sunda Yuhka. 2017. Kesiapan Masyarakat Perdesaan dalam mengelola Dana Desa, Prosiding Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung
- [Kemendes PDTT] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2016. Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. Kebijakan Dana Desa Tahun 2016. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdaharya Offset

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Prasetyo, Yudhi. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa di Wilayah Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *Dalam Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK (Sendi_U)*. Semarang.
- Rondinelli, Dennis A & Cheema, G Shabbir. 1983. *Decentralization and Development*, Sage Publication
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia
- Sidik, Machfud. 1996. *Keuangan Daerah. Modul Universitas Terbuka*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta
- Simanjuntak, Robert.A. 2002. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Kajian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Pasca Orde Baru. Dalam Seminar dan Dialog Nasional "Platform untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia" Padang 15-16 April 2002. USAID 2002*
- Sjafrizal.. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyi Kabupaten Temanggung Tahun 2008)* [Tesis]. Semarang. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 109 Hal
- Sudaryo, Yoyo, Sjarif, Devyanthy & Sofiati, N Ayu. 2017 *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.